

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Doly Triosaputra¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Bagaimana Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini di laksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara teknik penentuan informan adalah menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, adapun yang menjadi Narasumber yaitu Kasub. Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan dan Kabid. Pendaftaran dan Penetapan. Analisis data yang digunakan adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengatasi masalah Badan Pendapatan Daerah menggunakan strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu pertama pada Intensifikasi dan Ekstentifikasi dimana pada Badan Pendapatan Daerah Intensifikasi, bagaiman bisa mengoptimalkan lagi pajak-pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah sedangkan Ekstensifikasi mencari objek pajak yang baru, tapi pada Badan Pendapatan Daerah jenis pajak sudah dibatasi menjadi 11 pajak dan Retribusi 30 jenis. Kedua pelayanan, mengusulkan pelatihan pada sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja pegawai dan ahli pada bidangnya masing-masing, memperbaiki pelayanan yang ada saat ini. Dan yang ketiga Sumber Daya Manusia, sama seperti pelayanan, sumber daya manusia dilakukan pelatihan dan peningkatan kedisiplinan bagi pegawai atau sumber daya aparatur.

Kata Kunci: *Strategi, badan, pendapatan, daerah, asli.*

Pendahuluan

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah yang bersangkutan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun itu meningkat, maka daerah itu akan cepat berkembang. Untuk itu diperlukan penggalian sumber dana daerah yang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dollyputra@gmail.com

cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi. Berkaitan dengan sumber pendanaan tersebut, budget tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah daerah sendiri, tetap juga berasal dari bantuan pemerintah pusat.

Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah meskipun jumlahnya relative kurang memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasan dalam pembelanjaan APBDnya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah.

Pemberian kewenangan dalam penguasaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berisikan daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan perubahan dan perbaikan system administrasi perpajakan yang baik kepada wajib pajak maka disusunlah system administrasi perpajakan modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Intansi vertical dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang

Adanya hambatan Badan Pendapatan untuk melakukan tugasnya yang terjadi yaitu faktor rendahnya partisipasi yang diberikan cukup kecil, sehingga aparatur tidak bisa memberikan sumbangan pemikiran dan ide terhadap kegiatan penerimaan PAD. Ada faktor SDM dimana keterbatasan dan ketidakmampuan memiliki SDM yang berkualitas dan unggul dalam hal teknis dan teoritis, tentunya akan sangat menyulitkan organisasi dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Sumber daya manusia yang berkinerja baik akan memudahkan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting diperhatikan oleh organisasi, karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksana kegiatan organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber daya manusia yang tidak sesuai pada bidangnya mengakibatkan kinerja yang melambat dan terjadi permasalahan, banyak pegawai yang masuk tidak mempunyai keahlian dibidangnya dan diperlukan sumber manusia yang handal dan professional.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah otonom telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional. Pelaksanaan pembangunan Kutai Kartanegara sejak tahun 2011 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak tahun ke-3, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, renstra Badan Pendapatan Daerah ini memuat deskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan serta capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Sub Bagian dan seksi dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi,

pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divertasi, likuidasi, dan joint venture (David, p. 15, 2004).

Kuncoro (2005: 1-2) dalam buku yang berjudul “Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif” di jelaskan mengenai strategi menurut Itami, strategi merupakan penentuan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Badan Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Bapenda merupakan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tertentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah sendiri.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil kertegantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil dsitribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, restribusi daerah, laba

dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sector bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relative terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sector bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sector bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Pajak

Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tertentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah sendiri.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sector bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relative terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sector bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sector bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan

akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul di atas, maka jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian yang digunakan kualitatif, Menurut Moleong (2006:11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, foto, video, dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan dan dijadikan acuan dalam penelitian. Dalam hal ini, focus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yaitu:

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
2. Faktor-faktor penghambat strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber Data dan Klasifikasi Data

Sumber data dalam penelitian adalah orang, benda, objek yang dapat memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.

a. Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data utama yang dimaksud adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2013: 129). Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.

b. Sumber Data Tambahan (Skunder)

Sementara sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau sumber data kedua sesudah sumber data primer (Bungin, 2013:129). Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bias diabaikan dalam suatu penelitian, terutama

dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2006:159).

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33 penerjemah: Tjetjep) yang meliputi 4 komponen, diantaranya:

- a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti :Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan sebagainya
- b. Reduksi Data
Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.
- c. Penyajian Data
Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Penarikan Kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hasil Penelitian

Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Intensifikasi salah satu cara dari pihak Bapenda memaksimalkan mitra kerja yang ada saat ini dimana Bapenda mengintensifikasikan penerimaan melalui pajak dan retribusi yang sudah ada saat ini agar Bapenda bisa mengoptimalkan lagi pajak-pajak yang ada di Bapenda serta memiliki kerja sama yang bagus antar bidang agar memaksimalkan mitra kerja berjalan dengan baik dan saling mendukung masing-masing bidang, mitra kerja dan dari masyarakat bagi wajib pajak cara seperti ini aktif dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disini Bapenda melakukan pengawasan terhadap pajak parkir yang ada di rumah sakit Parikesit Tenggarong contohnya. Bapenda menggunakan mesin

tiket agar tidak adanya kecurangan yang terjadi, karena mesin tiket ini bekerja secara maksimal, itu salah satu yang dilakukan Bapenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor Pajak Parkir.

Dari Pajak Parkir itu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sector Pajak Parkir ini meningkat setiap tahunnya karena tingkat mencapai 205,94% melebihi target yang ditargetkan oleh Bapenda, Pajak Parkir berkontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) 0,17%. Pertumbuhan jenis Pajak Parkir ini tahun 2017 dan 2018 nilai pertumbuhannya 61,36%.

Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah dan atau memperluas faktor-faktor produksi yang digunakan. Ekstensifikasi sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara memperluas atau menambah objek penerimaan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang baru. Terdapat dua cara pelaksanaan ekstensifikasi:

1. Menggali sumber penerimaan baru

Dimaksudkan disini bahwa peraturan yang mengatur tentang pungutannya tidak digabung dengan sumber-sumber penerimaan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan penanaman investasi baik dari sector swasta maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bentuk proyek yang produktif yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Menambah sumber penerimaan

Maksudnya sumber-sumber penerimaan tersebut betul-betul baru dan pemungutannya dapat disatukan dengan sumber penerimaan lama. Dengan kata lain sumber penerimaan baru tersebut digabungkan dengan sumber penerimaan lama dengan menambah klasifikasi tarif baru kedalam peraturan daerah yang lama.

Sedangkan Ekstensifikasi satu cara Bapenda miliki dalam memaksimalkan mitra kerja yaitu dari pihak Bapenda dalam mengoptimalkan lagi pajak-pajak yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara, karena pajak dibatasi menjadi 11 jenis pajak yang hanya bisa dipungut dan retribusi yang ada 30 jenis. Ini dijalankan sesuai dengan UU No. 28 dan bekerja sama dengan mitra kerja dengan baik dan bagus agar berjalan dengan baik dengan satu tujuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun secara garis besar yang menjalin mitra kerja Bapenda saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Pariwisata
- d. Bank Kaltimara(BPD)
- e. KPP Pratama
- f. Badan Pertanahan

g. Kecamatan-kecamatan

Dalam memaksimalkan mitra kerja, Bapenda memiliki cara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Intensifikasi adalah bagaimana Bapenda mengintensifikasikan penerimaan Bapenda melalui pajak dan retribusi yang sudah ada, contoh: Retribusi Parkir, tahun ini Bapenda dapat sekian, jadi bagaimana Bapenda dan SKPD yang bersangkutan mengintensifikasikan retribusi parker ini bertambah, dan melalui Ekstensifikasi dimana dari pihak Bapenda mengoptimalkan lagi pajak-pajak yang ada.

Bapenda melakukan penambahan objek pungutan, contohnya pada Pajak Hotel. Bapenda menambahkan penggunaan fasilitas hotel dimasukan kedalam Pajak Hotel. Inilah salah satu yang dilakukan Bapenda dalam Ekstensifikasi. Bapenda juga melakukan pendataan ulang dan membuat inovasi yang mempermudah wajib pajak (WP) dalam melakukan pembayaran.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sector Pajak Hotel meningkat setiap tahunnya karena tingkat mencapai 118,60% melebihi target yang ditargetkan oleh Bapenda. Pajak Hotel berkontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) 0,48%. Pertumbuhan jenis Pajak Hotel tahun 2017 dan Tahun 2018 nilai pertumbuhan 4,80%.

Kepemimpinan Kepala Badan sekarang ini senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan juru pungut dan bekerja sama dengan SKPD yang bersangkutan serta mengajak pegawai-pegawai yang berada di Bapenda agar kerja sama Bapenda dengan SKPD lainnya berjalan dengan baik dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi dalam menjalankan tugas atau tupoksi Bapenda dan memiliki cara dalam memaksimalkan peranan juru pungut ini dilakukan dengan sesuai aturan karena dalam cara memaksimalkan peranan juru pungutan berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan misalnya seperti dengan pungutan pajak lainnya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum harus dipertimbangkan ketetapan suatu pajak sebagai pajak daerah dan memiliki cara untuk memaksimalkan peranan juru pungut ini.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan mungkin dianggap sebagai kegiatan yang berlebihan mengingat produk/jasa yang dihasilkan merupakan suatu produk/jasa yang tidak ada saingannya dipasaran atau dengan kata lain mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan pengurusan di organisasi/institusi/perusahaan itu juga.

Umumnya dalam melakukan pemungutan pajak harus dilandasi dengan system perpajakan yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan (customer service) yang baik kepada wajib pajak.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi Negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Program yang seperti ini sekarang sedang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan yang ada. Sekarang ini masih kurang memuaskannya pelayanan yang ada, oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah mengupayakan untuk lebih meningkatkan lagi guna untuk membuat pelayanan itu cepat, mudah, dan tepat. Ada program yang Badan Pendapatan Daerah akan lakukan yaitu memperbaiki system pelayanan.

Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan, ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor yang tersedia dengan kebutuhan aparatur/pegawai Bapenda sesuai standar kualitas pelayanan yang baik. Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan diperoleh dari perbandingan jumlah total sarana dan prasarana yang telah tersedia sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku dengan total sarana prasarana yang dibutuhkan dikalikan 100%. Kebutuhan sarana dan prasarana pada kantor Bapenda dibagi kedalam 4 jenis sarana dan prasarana, yaitu:

- a. Perlengkapan Kantor;
- b. Peralatan Kantor;
- c. Gedung Kantor UPT; dan
- d. Gedung Kantor Bapenda.

Bapenda dalam meningkatkan pelayanan melakukan beberapa program atau rencana yaitu: Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor, dan penambahan gedung UPT. Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor di Bapenda ada 12 Unit. Penambahan Peralatan Perlengkapan Kantor ini ada computer, mesin printer, kertas dan alat yang digunakan dalam pelayanan. Computer ditambah menjadi 4 unit dan mesin printer ditambah 4 unit. Sisanya yaitu kertas dan alat pembantu pada saat pelayanan.

Bapenda juga menambah gedung UPT untuk membantu pelayanan agar wajib pajak (WP) tidak jauh dalam membayar pajak. Pembayaran pajak bisa dilakukan diaerah wajib pajak (WP) itu sendiri dan tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk melakukan pembayaran. Jadi Bapenda akan menambah gedung UPT untuk mempermudah wajib pajak (WP) dalam pembayaran pajak.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

SDM yang ada di Bapenda sangat banyak dengan latar belakang pendidikan paling banyak adalah SLTA sebanyak 278 orang dan pegawai dengan latar belakang pendidikan paling sedikit adalah SD sebanyak 6 orang hal tersebut

menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu SLTA dan latar belakang pendidikan Sarjana (S1-S3) 113 orang, ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat banyak sebagai salah satu strategi kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan memberikan pendidikan formal baik itu berupa tugas belajar maupun ijin belajar yang diberikan kepada pegawai dalam pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah melalui pendidikan merupakan faktor dominan meningkatkan efisiensi kerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar pegawai negeri sipil dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global.

Saat ini Bapenda membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas dalam menjalankan tupoksinya masing-masing disetiap bidangnya saat ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bapenda 423 orang dan akan memfokuskan dalam memaksimalkan SDM yang ada melalui penyelenggaraan pendidikan atau memberi pendidikan formal. Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan melalui pendidikan merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar pegawai negeri sipil dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global.

Pemberian pendidikan seperti ini diharapkan bisa membantu dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang dimiliki Bapenda saat ini. Selain pelaksanaan pendidikan seperti ini aparatur pemerintah akan memiliki kompetensi yang semakin baik lagi dalam melaksanakan setiap kegiatannya dengan menerapkan berbagai metode dan pengalaman yang didapatkan selama pendidikan atau pelatihan tersebut, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul sehingga tercipta kualitas pelayanan yang semakin baik untuk kepentingan instansi maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Bapenda harus bisa memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini karena itu seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu kreativitas dan inovasi. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan bidang lain atau staf-staf yang ada di Bapenda satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan wawasannya, seorang pegawai harus mengikuti pengembangan. Sebab ke depannya Bapenda membutuhkan SDM yang handal dan berkualitas, dan diharapkan pegawai bisa mencari lebih dari itu dalam memaksimalkan SDM yang ada di Bapenda melakukan atau punya acara sendiri yaitu dengan memaksimalkan staf-staf yang ada di Bapenda seperti saling membantu antar bidang, koordinasi antar bidang harus bagus, kerja sama sesama staf atau bidang yang baik.

Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan persentase SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/pelatihan. Penetapan indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah, sehingga

mampu meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD.

Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2018 sebesar 70%. SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/pelatihan sampai tahun 2018 sebanyak 280 orang, sedangkan jumlah total jumlah pegawai yang seharusnya mengikuti Diklat Teknis Fungsional yaitu sebanyak 417 orang. Dari data ini maka persentase SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/pelatihan sampai tahun 2018 yaitu sebanyak 67,15%, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 70%, maka capaian kinerja pada tahun 2018 yaitu 95,92% **(sangat tinggi)**

Ada beberapa Bimtek/pelatihan yang diadakan dan diikuti oleh pegawai Bapenda, Bimtek/pelatihan dilaksanakan oleh: Kemetrian Keuangan, Tata Cara Pengelolaan Pajak, dan Penilaian PBB (Pajak Bumi Bangunan). Bimtek/pelatihan juga diikuti staff dan jabatan lainnya.

Faktor-faktor penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara

Yang menjadi penghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah Internal dan Eksternal yang dilakukan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia(SDM)
Adapun hambatan yang dihadapi pada Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas pada masing-masing bidang, karena tidak adanya pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
Adapun hambatan selanjutnya yang dihadapi pada Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah: tidak adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Ini salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh Bapenda. Pada saat melakukan penetapan wajib pajak, penagihan, pendataan, dan pemungutan bagi masyarakat wajib pajak. Masyarakat sering tidak membayar pajak pada tepat waktunya, dengan beragam alasan tidak membayar pajak tepat waktu yang sudah diberikan oleh Bapenda. Masyarakat tidak tepat waktu membayar pajak, karena kurang tau waktu pembayaran dan kurangnya sosialisasi tentang perda/peraturan yang baru kepada masyarakat wajib pajak.
3. Kurangnya sarana dan prasarana
Ada pun hambatan selanjutnya yang dihadapi pada Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: sarana dan prasarana yang masih kurang dalam melakukan pelayanan, oleh karena itu

kinerja pelayanan tidak optimal dilaksanakan karena masih menggunakan alat seadanya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah melakukan semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi, banyak program atau rencana yang sudah dilakukan Bapenda2 dan ada yang sudah dijalankan
2. Target dan realisasi pajak dapat diketahui bahwa pungutan pajak sudah berjalan dengan baik dan ini dapat dilihat dari pendapatan asli daerah di tiap tahunnya mengalami peningkatan.
3. Pengawasan terhadap wajib pajak sudah terlaksana namun kurang optimal karena banyak kesadaran masyarakat yang masih rendah dan belum mengerti wajib pajak itu.
4. System pelaksanaan pungutan pajak terlaksana dengan baik meskipun perlengkapan kerja sebagai penunjang pencapaian tujuan masih relative terbatas dan Bapenda harus meningkatkan kualitas dan kuantitas perlatan pelayanan (Cepat, Tepat, dan Murah)
5. Bimtek/pelatihan sudah dilakukan Bapenda untuk memberikan kemampuan yang lebih terhadap Sumber Daya Manusia, banyak pelatihan yang diikuti oleh Pegawai Bapenda dan bapenda juga mengirim aparatur untuk mengikuti pelatihan melalui undangan.

Saran

1. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan pungutan yang memiliki kualitas baik atau sumber daya manusia (SDM) yang memiliki handal dimasing-masing bidangnya oleh karena itu dari aparat Badan Pendapatan Daerah perlu mengadakan pelatihan dan memperbaiki masalah sumber daya manusia yang ada saat ini.
2. Bapenda harus mengusulkan pelatihan pelayanan (orang yang ada dipelayanan), memperbaiki pelayanan software dan hardware, mengusulkan pengadaan alat-alat pelayanan, biar semuanya bisa terpenuhi dan berjalan secara optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- David, F.R (2004). *Manajemen Strategi*. Jakarta, Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi (Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif)*, Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Pajak Bumi dan Bangunan*. PT. Eresco Bandung.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. Cetakan kedua puluh.
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Display Data For Qualitative Reasearch. Edisi 7. Penerjemah Tjetjep*. Rosdakarya Bandung.
- Santoso. 1995. *Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.